

## EVALUASI PROFIL DESA DI TIGA DESA PROVINSI JAWA BARAT

### VILLAGE PROFILE EVALUATION IN THE THREE VILLAGE OF WEST JAVA PROVINCE

**Gunawan**

Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan  
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri  
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta, Indonesia  
No. Telp./Faks: +62 21 314 0454; HP. +62 812 8717 7702; +62 878 8884 7599  
e-mail: wgbppkemendagri@gmail.com, wawangunawan678@gmail.com  
Diserahkan: 23/07/2017, Diperbaiki: 19/07/2017, Disetujui: 20/09/2017

#### Abstrak

Sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendencygunaan Data Profil Desa/Kelurahan berjalan selama 10 (sepuluh) Tahun namun hasil yang dicapai dalam pengisian lampiran 1, 2 dan 3 data Profil Desa Kelurahan (prodeskel) melalui *website* Kementerian Dalam Negeri 2018/2017 masih rendah yaitu sekitar 55,14%, atas dasar permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pengisian profil desa, dengan tujuan penelitian itu maka metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengambilan data melalui wawancara, *quesioner* dan studi pustaka, selanjutnya hasil data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik pengambilan sampel didasarkan pada studi kasus pada daerah yang memiliki keunikan dan tingkat pengisian profil desa melalui *website* dengan 3 (tiga) kriteria yaitu terendah, sedang dan tinggi, dengan demikian maka pemilihan informan lokasi penelitian ditentukan sebagai sumber informasi yaitu masing-masing 1 informan Pokja di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan serta 3 informan Pokja dan sekretaris desa, dari informan tersebut ditemukan hasilnya bahwa komitmen kepala desa belum optimal, Sumber Daya Manusia yang menangani profil desa masih kurang, Sarana Prasarana belum memadai, serta banyaknya jumlah pertanyaan dan teknik menganalisa data masih panjang, dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa belum berkomitmen membuat Tim Kelompok Kerja (Pokja), petugas pengelola profil desa masih terbatas, jangkauan internet masih sulit diakses, belum ada petugas dan komputer secara khusus untuk pengisian profil desa, masih terdapat beberapa pertanyaan yang berulang ulang, perhitungan teknik analisis desa belum memasukan unsur fakta di lapangan,

**Kata kunci:** Evaluasi, Profil desa, Tim Kelompok Kerja, Desa

#### Abstract

*Since the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2007 on Guidelines for the Preparation and Utilization of Village Profile Data runs for 10 (ten) Years but the results achieved in the completion of attachments 1, 2 and 3 data Village Village Profile (prodeskel) through the website of the Ministry of Interior 2018/2017 is still low around 55.14%, on the basis of these problems so this study aims to determine the factors-fator causes low level of filling village profile, with the aim of the research then descriptive research method with qualitative approach, as well as data retrieval techniques through interview, questioner and literature study, then the results of the data are analyzed descriptively qualitative, the sampling technique is based on case study on the uniqueness of the area and the level of filling the village profile through the website with 3 (three) criteria ie the lowest, medium and high, informant of study location determined as a source of information that is each 1 Working Group in West Java, Bandung Regency and also 3 Informant Pokja and village secretary, from the informant found the result that commitment of head of village not yet optimal, Human Resources handling village profile still less, Infrastructure Facility the number of questions and techniques of analyzing the data is still long. From the findings it can be concluded that the village apparatus has not yet committed to making the Working Group (Pokja), the village profile manager is still limited, the reach of the internet is still difficult to access, specifically for the filling of village profiles, there are still some repeated questions, the calculation of village analysis techniques has not included elements of facts in the field,*

**Keywords:** Evaluation, Village profile, Team Working Group, Village

#### PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendencygunaan Data Profil Desa/Kelurahan berjalan

selama 10 (sepuluh) Tahun namun hasil yang dicapai dalam pengisian lampiran 1, 2 dan 3 data Profil Desa Kelurahan (prodeskel) melalui *website* Kementerian Dalam Negeri 2018/2017 masih rendah yaitu sekitar

55,14%, berdasarkan Rekapitulasi Entri Data Prodeskel Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, posisi tanggal 21 Agustus 2017 sebanyak 519 kabupaten kota di Indonesia yang belum mengentri data prodeskel yaitu 39 kabupaten kota, sedangkan yang telah mengentri data prodeskel sebanyak 480 kabupaten kota, namun bila dilihat dari jumlah desa dan kelurahan secara keseluruhan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia terdapat 85.351 desa dan kelurahan, dari jumlah desa dan kelurahan tersebut belum mengentri data sebanyak 38.282 desa dan kelurahan, sedangkan yang telah mengentri data sebanyak 47.069 desa kelurahan, atau bila diprosentasikan jumlah desa dan kelurahan yang telah mengentri data baru sekitar 55.14%, dari sejumlah 39 kabupaten kota yang belum mengisi tersebut sebagian besar berada di Provinsi Papua sebanyak 18 kabupaten kota, diantaranya adalah pada Kabupaten Papua Barat 9 kabupaten kota, dan sebagiannya berada di Indonesia Timur, sedangkan Indonesia Barat hanya 2 kabupaten kota yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, untuk wilayah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan sebanyak 27 kabupaten kota sudah mencapai 100% telah mengentri data, namun bila dilihat dari masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat masih ditemukan beberapa desa yang belum mengentri data prodeskel, berikut data prodeskel secara keseluruhan jumlah desa kelurahan sebanyak 6.054 desa, yang telah mengisi data profil desa sebanyak 5.211 desa, dengan demikian masih terdapat 854 desa yang belum mengentri atau sekitar 13,93%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data profil desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan, semula pada Tahun 2012 terdapat 63 desa saja yang mengentri data berikutnya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada posisi 165 desa dan kelurahan, hal ini menunjukkan bahwa dari Tahun 2017 tidak mengalami perubahan, data tersebut diambil dari Kecamatan Cimaung pada tiga desa yaitu Desa Cipinang, Desa Cikalong dan Desa Suka Makmur keseluruhan format lampiran Permendagri 12 Tahun 2007 Profil Desa terdiri dari lampiran 1 (satu) berisi Data Dasar Keluarga, lampiran 2 (dua) berisi Data Potensi Desa serta lampiran 3 (tiga) berisi Data Perkembangan Desa, sedangkan yang dimaksud dengan Profil Desa dan Kelurahan menurut Permendagri 12 Tahun 2007 adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Data-data yang terdapat di lampiran 1, 2 dan 3 tersebut dikelola oleh tim yang disebut Kelompok

Kerja (Pokja), tim ini bertugas menyusun profil desa yang dilaksanakan dan dibentuk berdasarkan tingkatan mulai dari Kelompok Kerja (Pokja) desa sampai pada tingkat Provinsi. menurut data Profil Desa dan Kelurahan (prodeskel) 2018/2017 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri terdapat 39 Kabupaten Kota belum mengisi profil desa dari 519 Kabupaten Kota, jumlah desa sebanyak 85.351 desa dan kelurahan yang mengisi data 47.069 desa dan kelurahan atau sekitar 55.14%, data prodeskel ini diperoleh dengan cara menghimpun seluruh kabupaten kota setiap setahun sekali dan hasilnya pada Tahun 2017 menunjukkan sekitar 44.76% desa dan kelurahan yang belum mengisi profil desadan sebagian sudah ada yang mengisi namun belum seluruhnya, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan sudah berjalan cukup lama sekitar 10 Tahun namun hasil yang diharapkan belum sesuai, hal inilah kiranya yang perlu diteliti kembali dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan capaian tersebut.

Untuk itu kiranya penelitian evaluasi profil desa perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan beberapa tinjauan dari berbagai teori dan pengalaman praktisi para pakar dan ilmuan, dan tidak kurang pentingnya dari norma-norma hukum terkait dengan profil desa, seperti defenisi evaluasi merupakan rangkaian terakhir dari rangkaian manajemen, evaluasi juga dapat diartikan dengan penilaian suatu kegiatan berhasil atau tidak, kemudian Annas (2017) pengertian evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memenuhi atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik, dimana hasil-hasil dan evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menjadi umpan balik bagi perencanaan kembali sedangkan menurut proses pengeluaran dan perbandingan daripada hasil-hasil pekerjaan yang senyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai, selanjutnya menurut Mustopadidjaja (2014) Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan, dengan kata lain evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Beberapa defenisi evaluasi kebijakan telah dikemukakan oleh para pendahulu yang merumuskan pengertian dan tahapan evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan memiliki alasan dalam mengevaluasi, Fiki Porniadi (<http://fikiporniadi.blogspot.co.id/2014/04/evaluasi-kebijakan.html>) 1). untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya. 2). mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat

efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, 3). memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah, 4). menunjukkan pada stakeholder manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program, 5). agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik, jadi menurut penulis berdasarkan referensi para pendahulu teori evaluasi kebijakan menurut Fiki Porniadi, Mustopadijaya dan Aswar Annas bahwa proses atau tahapan evaluasi itu sangat penting bagi suatu pengambilan kebijakan, karena dengan adanya proses atau tahapan evaluasi kebijakan maka akan diketahui kebijakannya itu berhasil atau tidak dilaksanakan oleh para penggunanya, jika tidak maka segera diperbaiki kebijakannya dan diketahui kelemahannya.

Selain yang telah dikemukakan oleh beberapa sumber mengenai evaluasi khususnya evaluasi kebijakan, penulis juga menyandingkan antara teori yang ada dengan arti evaluasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan sebagai berikut,

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan tentang Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. teori evaluasi telah disampaikan beberapa sumber baik dari pakar maupun dari regulasi yang ada, untuk membahas dan memperkaya penelitian ini kiranya perlu juga disampaikan beberapa definisi atau arti yang terkait dengan pengertian profil.

Profil adalah sebuah gambaran singkat tentang seseorang,, organisasi, benda lembaga ataupun wilayah, cara menulis profil yang baik ditulis secara singkat dan jelas dan dapat menggambarkan sesuatu yang kita tulis baik itu berupa seseorang, benda lembaga ataupun wilayah, profil bisa dibuat tertulis, baik di dalam sebuah buku, di blog atau *website* sesuai dengan kebutuhan kita (blogger 2018), kemudian arti profil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

profil/*pro-fil/ n* 1 pandangan dari samping (tentang wajah orang); 2 lukisan (gambar) orang dari samping; sketsa biografis; 3 penampang (tanah, gunung, dan sebagainya); 4 grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus, namun profil (diakses tanggal 27 Maret 2018) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan, Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan Kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi, penyelenggaraan pelaksanaan pengisian profil desa diawali dengan pembentukan kelompok pekerja profil desa (Pokja Profil Desa), pembentukan Pokja Prodes pada tingkat desa didasari oleh ketetapan kepala desa melalui Keputusan dari gubernur selaku kepala pemerintahan Provinsi hingga Kepala Desa selaku kepala pemerintahan di desa, dengan demikian maka faktor kepemimpinan dan manajemen merupakan faktor yang sangat penting untuk melanjutkan ketahapan selanjutnya dalam penyusunan profil desa.

Kegiatan penyusunan profil desa dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa di tingkat provinsi hingga desa dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil desa di tingkat provinsi sampai dari gubernur sampai kepala desa, dan susunan Pokja profil desa terdiri dari: penanggungjawab adalah Kepala Desa, ketua dijabat oleh Sekretaris Desa, anggota terdiri dari perangkat desa, Kepala Dusun/ Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di desa dan kecamatan serta penetapan pokja profil desa ditetapkan oleh kepala desa melalui Keputusan Kepala Desa, begitu juga Kelompok Kerja pada kecamatan melalui Keputusan Camat, Kelompok Kerja Kabupaten melalui Keputusan Bupati, sedangkan pada tingkat Provinsi melalui Keputusan Gubernur

Pokja Pokja tersebut melakukan pengumpulan informasi dengan mengumpulkan data profil desa dan Kelurahan melalui kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, lurah dan perangkat desa dan Kelurahan, pengurus TP-PKK dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di desa, Kelurahan dan kecamatan, kegiatan pengolahan data profil desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat

desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota sampai tingkat provinsi, data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang telah dikumpulkan, diolah oleh Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil RIAD (*software*), alat pengolah data (*hardware*) serta dukungan sumber daya manusia (*brainware*) yang ditetapkan menurut standar nasional, pengolahan data profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui klarifikasi, tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi baik melalui program aplikasi maupun secara manual.

Berdasarkan latar belakang serta untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini maka penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian evaluasi pelaksanaan profil desa, seperti: Sekeon (2016) dengan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pentingnya pembuatan profil desa dan kelurahan dibuat berdasarkan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Sistem Informasi Geografis (SIG) ini menawarkan sistem yang lebih kompleks untuk menganalisa data-data profil desa / kelurahan. Sistem Informasi Geografis bertujuan memberikan Informasi hasil analisa data spasial untuk pembangunan desa / kelurahan. Pengumpulan data merupakan hal yang penting karena keluarannya akan menjadi bagus jika data yang dimasukan lengkap dan akurat, sistem ini juga terdapat basis data yang berfungsi sebagai penyimpanan data dan informasi, sistem ini diharapkan dapat membantu pembuatan profil desa yang lebih baik, sependapat dengan Nobel D Sekeon adalah yang disampaikan Puryanto.

Puryanto (2013) menceritakan bahwa betapa pentingnya memiliki informasi yang benar dan akurat, karena dengan memiliki informasi yang baik dan benar melalui *website* dapat diketahui oleh masyarakat secara luas potensi-potensi yang ada di desa, hal itu senada dengan Nobel D Sekeon menegaskan bahwa jika proses pengumpulan data merupakan hal yang penting karena keluarannya akan menjadi bagus jika data yang dimasukan lengkap dan akurat, profil desa yang digagas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, menyerupai dengan Puryanto jika yang dimaksudkan *website* yang dibuat sendiri pada dasarnya yang penting dapat diintegrasikan dengan *website* yang dikelola Ditjen Pemdes.

Penelitian yang serupa yaitu yang dilakukan oleh Dako (2014) Prototipe Website untuk Sajian

Informasi Profil Desa Binaan Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu Implementasi Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah website prototype berisi profil desa di bawah bantuan UNG. terutama pelaksanaan layanan masyarakat dalam bentuk database informasi yang berfungsi untuk membuka kesempatan untuk berbagi sumber daya eksternal untuk memperkuat lembaga desa, optimalisasi sumber daya desa, pengembangan kapasitas desa, dan keberlanjutan pemerintahan desa yang global, dan pada akhirnya meningkatkan promosi sumber daya desa, melalui pengembangan Website hasil prototipe sistem informasi geografis dengan sedikit modifikasi dalam database dan interface.

Budiman (2016) E-Government Data Profil dan Monografi Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda menyimpulkan bahwa pendayagunaan data profil desa dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik potensi sumber daya, perkembangan segala sektor pembangunan, serta permasalahan pembangunan di setiap desa dan kelurahan, menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa dan kelurahan bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dikenal E-Government dalam pengolahan data profil dan monografi desa/kelurahan.

Priyanti (2013) dalam penelitiannya menemukan Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, menggunakan sistem informasi konvensional terlihat sangat lamban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dalam proses pencatatan data penduduk pada sebuah buku induk, kemudian direkap kembali untuk membuat laporan penduduk. Sistem yang berjalan mempunyai banyak kekurangan diantaranya memungkinkan adanya kesalahan, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian data, maupun dalam proses pembuatan laporan, untuk itu diperlukan sistem informasi pengelolaan data penduduk yang lebih cepat, tepat guna, efektif dan efisien pada kantor Desa Bogoharjo.

Indah (2011) dalam penelitiannya Pembuatan Website Sebagai Sarana Promosi Produk Kelompok Pidra Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, adanya Usaha kelompok PIDRA desa gawang dalam pembuatan promosi produk masih menggunakan informasi secara bertatap muka serta belum terdapat website. Sehingga kurang menarik maka dari itu usaha kelompok PIDRA desa gawang sangat membutuhkan website sebagai media informasi yang lebih menarik. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan website agar mampu menarik

masyarakat. Diharapkan website ini dapat memudahkan untuk mempromosikan usaha kelompok PIDRA desa gawang. Kepada masyarakat serta bisa berguna untuk lebih menambah wawasan dan minat masyarakat untuk mengetahui produk yang dihasilkan dikelompok PIDRA.

Utomo (2010) penelitiannya *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web*, dalam memanfaatkan infrastruktur yang ada dengan mengisi konten / membangun aplikasi yang bersifat e-Government. Seringnya permintaan data tentang perangkat desa dan potensi desa oleh para pimpinan instansi pemerintahan yang lebih tinggi, yang dilakukan secara manual tidak menutup kemungkinan data-data yang disampaikan kurang akurat ataupun kurang cepat, lagipula adanya potensi-potensi desa yang belum optimal serta terjadinya perubahan data-data di desa perlu mendapatkan perhatian yang serius semua pihak, disimpulkan perlu ada pengembangan sistem dilakukan berdasarkan pendekatan metode *System Development Life Cycle (SDLC)* yang meliputi tahapan-tahapan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi system, sehingga dengan mudah data didapati dan akurat.

Penelitian Nobel D Sekeon maupun Puryanto dapat berjalan dengan baik jika data dilakukan dengan baik dan benar, untuk dapat menyajikan data baik dan benar diperlukan proses pengambilan datanya diikuti dengan benar pula, hal inilah membuat Achsin (2015) melakukan penelitian, penelitian Sitti Nurmasita Achsin membahas pada proses pengumpulan data desa yang dilakukan oleh aparatur atau petugas yang mengisi data profil desa, hasilnya penelitiannya menyatakan bahwa belum ada yang menangani secara khusus dalam proses pengisian dan pemanfaatan *website* profil desa, yang dilakukan penelitian Dako, Budiman, Priyanti, Indah, Utomo, kesemua peneliti memfokuskan pada pentingnya website desa, bila profil desa dalam bentuk website dapat terbentuk maka data dapat diperoleh secara benar sehingga hasil data masih belum tepat sesuai kondisi desa, pada dasarnya jarang sekali data profil desa digunakan sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan, pernyataan Sitti Nurmasita sangat berbeda dengan Nobel D Sekeon dan Puryanto, karena Sitti melihat pada proses pengambilan data dan pemanfaatannya sedangkan Nobel D Sekeon memfokuskan pada upaya memperkenalkan profil desa melalui jaringan internet. Pernyataan Sitti Nurmasita dan Asrori pada prinsipnya hampir sama yaitu memfokuskan pada proses pengambilan data desa.

Menurut penelitian Asrori (2014), proses pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar, dan tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi

potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama, sedangkan menurut penelitian Lail (2015) meneliti betapa sangat pentingnya informasi dalam bentuk profil sebagai salah satu cara mempromosikan sebagai pusat pengembangan teknologi pertanian (*Agro Techno Park*). Profil dibuat dalam bentuk buku dan digital agar informasi mengenai desa dapat diakses dengan mudah dan cepat, penelitian Jamalul Lail menitik beratkan pada pentingnya profil desa dilakukan karena dengan adanya profil desa yang lengkap dan terpercaya akan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh khalayak ramai sebagai sumber informasi dan dapat mempromosikan desa yang memiliki kemampuan sumber daya dan kekayaan yang akan dioleh sebagai sumber ekonomi, mendukung dan sepakat yang disampaikan oleh hasil Jamalul Lail bahwa betapa pentingnya memiliki data profil desa sebagai sumber informasi yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan atau sebagai pengembangan kelanjutan pada bidang lain.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan profil dapat penulis kelompokkan menjadi 3 yaitu penelitian yang memfokuskan pada proses pengumpulan data profil desa sebagai sumber data oleh Sitti Nurmasita dan Asrori, selanjutnya kelompok yang kedua adalah pada peneliti Nobel D Sekeon dan Puryanto memfokuskan pada bagaimana data profil itu di jaga keamanannya serta data profil dapat diakses oleh masyarakat, selanjutnya kelompok yang ke tiga adalah memfokuskan pada pemanfaatan data profil desa yaitu disampaikan peneliti Jamalulul lail, dari penelitian-penelitian terdahulu tidak satupun membahas tentang faktor-faktor kegagalan dalam mengentri data, untuk itu maka penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, yaitu mencari faktor-faktor kegagalan implementasi Profil desa dalam bentuk *website* Kemendagri, untuk itu kiranya penelitian ini kiranya menjadi penting.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini berupa gambaran dan narasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dan questioner terbuka sehingga tergambar dan terungkap fakta-fakta dan permasalahan secara jelas dan akurat, teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara langsung dan melalui questioner terbuka, data diperoleh dari Pusat berupa data prodeskel dan data rekapitulasi profil desa serta dari daerah adalah berupa profil desa, monografi desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dengan teknik pengumpulan data triangulasi tersebut data akan terjaring dengan lengkap dan akurat, dengan

terkumpulnya data-data tersebut kemudian data diolah dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Metode analisis data, teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, metode analisis data dengan melakukan penyaringan data-data yang terkumpul melalui questioner kemudian dikelompokkan berdasarkan materi soal yang terkait dasar hukum, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta terakhir pada dengan pendalaman memperhatikan dengan seksama poin demi poin materi-materi substansi yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman dan Penyusunan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, kemudian dipilah pilah berdasarkan pemahaman dan perbandingan,

Metode pengambilan sampel adalah non probability sampel yaitu dengan melakukan studi kasus yang merupakan gambaran dan realitas pada desa-desa yang ada di Indonesia, studi kasus yang dipilih adalah pada desa-desa yang mengalami permasalahan dan desa-desa yang telah berhasil mengisi aplikasi *website* yang dikelola Ditjen Pemdes Kemendagri, hasil dari kesimpulan studi kasus tidak dapat digeneralisir kepada desa-desa yang lain. Studi kasus ini mengambil kasus pada Provinsi Jawa Barat khususnya pada Kabupaten Bandung dengan pertimbangan bahwa pada Tahun 2017 bahwa Kabupaten Bandung Kecamatan Cimaung memiliki beberapa klasifikasi desa unik sehingga fokus penelitian pada daerah ini karena memiliki beberapa keunikan maka penelitian ini diarahkan pada studi kasus beberapa desa yang memiliki klasifikasi yang berbeda dalam satu kecamatan, seperti Desa Suka Maju termasuk dalam klasifikasi desa swadaya, sedangkan desa selanjutnya adalah desa Cikalong tergolong dalam klasifikasi desa swadaya dan desa Cipinang termasuk dalam klasifikasi desa swasembada, berdasarkan lokasi sampel tersebut maka batasan dalam penelitian pada pengentrian data profil desa.

Batasan penelitian ini sengaja penulis lakukan untuk membatasi masalah masalah yang terjadi sehingga penelitian tidak terfokus pada permasalahan yang sesungguhnya akan diteliti, batasan masalah ini pada faktor-faktor yang menghambat pada pengisian data profil desa melalui *website* Kementerian Dalam Negeri, faktor faktor ketidak berhasilan pengentrian data antara lain telah teridentifikasi seperti faktor komitmen kepala daerah atau kepala desa, kemudian faktor sumber daya manusia yang bertugas mengentri data profil desa, selanjutnya faktor sarana prasarana yang cukup mempengaruhi tingkat keberhasilan capaian pengentrian data profil desa, dan terakhir

batasan yang akan kami gunakan adalah pada pertanyaan pertanyaan yang terlihat tebal, dengan batasan tersebut mengingat waktu juga yang membatasi maka pelaksanaan penelitian dilaksanakan.

Penelitian dilakukan selama 5 hari 4 malam dari tanggal 13 Nopember sampai dengan 17 Nopember 2017, informan pada penelitian ini adalah kelompok kerja (pokja) Profil Desa Provinsi/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Badan Pemberdayaa Masyarakat Desa, pokja Profil Desa Kabupaten/Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa dan Sekretaris Kecamatan Cimaung, pokja Profil Desa Tingkat Desa/Perangkat Desa sebanyak 3 desa dan Kepala Desa Cikalong, Desa Suka Maju dan Desa Cipinang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan capaian pengentrian data profil desa melalui *website*, adalah:

### Komitmen Kepala Desa

Komitmen Kepala Daerah dalam menetapkan surat kelulusannya baik di tingkat Provinsi sampai kepada tingkat desa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Provinsi Jawa Barat telah mengaplikasikan amanat pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan setahun setelah Peraturan Menteri ini dikeluarkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup cepat menanggapi dan sangat peduli dengan data profil desa, dengan data profil desa dapat diketahui sumber-sumber potensi desa yang berada di Provinsi Jawa Barat, tidak memakai waktu yang lama untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Lahirnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Provinsi Jawa Barat seharusnya juga menetapkan dan memutuskan peraturan terkait dengan pembentukan kelompok kerja di Provinsi Jawa Barat, namun apa yang terjadi 9 (sembilan) Tahun kemudian baru ada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 140/Kep.327-DPM-Desa/2017 Tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di Daerah Provinsi

Jawa Barat, atau sering disebut juga dengan Kelompok Kerja (Pokja) Profil desa, semestinya keputusan itu tidak jauh berbeda waktunya dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Provinsi Jawa Barat saja baru memutuskan Tim Pokjanya pada Tahun 2017, sebagaimana diketahui Provinsi Jawa Barat ini memiliki 27 Kabupaten Kota dan 6.054 desa, dengan banyaknya jumlah desa tersebut apakah dengan cepat pula dapat terbentuk pada pokja-pokja pada tingkat desa.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 140/Kep.327-DPM-Desa/2017 Tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa Pokja profil desa mempunyai tugas memfasilitasi pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di daerah Provinsi Jawa Barat, untuk dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, dan bahan analisis kebijakan pembangunan desa/perdesaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan demikian maka segala yang terkait dengan pengentrian data profil desa menjadi tanggungjawab Tim Pokja Profil Desa.

Data profil desa kelurahan (prodeskel) 2016 Provinsi Jawa Barat terdapat 8 Kabupaten Kota yang telah mengisi secara penuh 100% yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Sukabumi, dan Kota Banjar, namun data tersebut tidak secara utuh melihat sub-subnya, seperti pada Kabupaten Bandung bila melihat datanya 100% sudah terisi namun masih ada desa-desa yang belum mengisi profil desa melalui *website*. Artinya pernyataan 100% tersebut tidak murni semua desanya mengentri data profil desa masih ada saja yang belum mengisi, pernyataan tersebut belum menggambarkan keseluruhan telah mengisi data profil desa, dengan demikian maka pada Tahun 2016 data prodeskel yang mencapai 100% pengisian prodeskel yaitu 29%, selebihnya berkisar antara 54% sampai dengan 94%, terdapat Kabupaten yang masih dibawah 2% yaitu Kota Tasikmalaya mencapai 1,45% dengan 69 Kelurahan yang mengisi prodeskel hanya satu kelurahan saja.

Provinsi Jawa Barat telah membentuk Tim POKJA Profil Desa melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140/Kep.327-DPM-Desa/2017 Tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan Di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung telah membentuk tim pokja profil desa lebih dahulu dari tim pokja profil desa Provinsi Jawa Barat, yaitu melalui Keputusan Bupati Nomor 410/Kep.547-bpmpd/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di daerah Kabupaten Bandung.

Pembentukan kelompok kerja profil desa di 3

(tiga) lokasi hanya Desa Cipinang yang telah membuat kelompok kerja profil desa sesuai amanat Permen- dagri 12 tahun 2007, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen Kepala Desa Cipinang yang ingin memiliki data profil desa secara lengkap dan akurat sehingga tingkat kepedulian terhadap pengisian lampiran profil desa sangat antusias sekali, hal tersebut didukung dengan fasilitasi Kepala Desa Cipinang dengan memberlakukan jam kerja hingga larut malam pada saat koneksitas internet pada siang hari sangat lambat, tidak berhenti sampai disitu saja Kepala Desa Cipinang juga memberikan dukungan berupa dalam bentuk makanan dan minuman bagi Tim Pokja yang bekerja sampai larut malam.

Tim Pokja Profil Desa di Desa Cipinang bertugas memfasilitasi pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data profil desa secara berkala, hal yang berbeda di alami oleh kedua desa yaitu desa Cikalong dan Desa Suka Makmur belum membuat Tim Pokja, data profil desa telah masuk di data Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Bandung sejak Tahun 2013 hingga sekarang, namun terlihat data desa Cikalong dan Desa Suka Makmur belum mengisi data profil desa melalui *website*, sehingga tidak ada petugas secara khusus menangani pengentrian data profil desa, sehingga pengentrian data profil desa di desa Cikalong ditangani oleh sekretaris desa atau kepala Seksi pemerintahan dan di Desa Suka Makmur ditangani oleh kepala seksi kesejahteraan.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang mengelola profil desa baik telah bergabung dalam Tim Pokja maupun yang belum bergabung dalam Pokja sama-sama memiliki keterbatasan baik secara kuantitas maupun kualitas, namun yang membedakannya adalah jika sumber daya manusia yang tergabung dalam Pokja memiliki tanggungjawab untuk menuntaskan segala permasalahan yang terkait dengan profil desa dari mulai pengumpulan data hingga sosialisasi data profil desa, dengan adanya tugas dan tanggungjawab tersebut akan mendapat penghargaan dalam bentuk materi, sehingga Pokja ini diserahkan untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang terjadi dengan profil desanya, kemudian untuk desa yang belum terbentuk Pokja proses menginput data profil desa dalam bentuk *website* pada umumnya dilakukan oleh orang yang sama yaitu kasie pemerintahan dan atau kasie kesejahteraan, keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di desa yang belum terbentuk Pokja proses pembuatan buku dan menginput data desa dalam bentuk monografi maupun *website* profil desa pada umumnya dilakukan oleh orang yang sama yaitu kasie pemerintahan dan atau kasie kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan bersama seksi kesejahteraan dan seksi pembangunan

serta sekretaris desa yang mengatur pelaksanaan data desa dari mulai mengambil data ke rukun warga sampai rukun tetangga sampai kepada menginput data, hal inilah yang menghambat data profil desa menjadi lebih lama proses pengentriannya.

### Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana cukup mempengaruhi dalam proses penginputan data profil desa, pada saat menginput data profil desa dikarenakan sinyal di desa lemah dengan kondisi yang jauh dari pusat kota serta server dengan kapasitas brandwit di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang berada di Pasar Minggu kecil, sehingga untuk menginput data profil desa membutuhkan waktu yang lama, terkadang sudah menunggu lama namun tidak masuk ke dalam server di Ditjen PMD.

Melihat seringnya pada saat menginput data menghabiskan waktu yang lama tersebut, maka sejumlah kepala desa Cipinang, Cikalong dan Suka Maju memfasilitasi kepada Kepala Seksi Pemerintahan maupun Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Kesejahteraan untuk menginput data profil desa pada saat malam hari, sekitar jam 20.00 sampai dengan jam 24.00.

Dengan adanya Keputusan Kepala Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, maka Kepala Desa Cipinang berwenang mengatur segala keperluan terkait dengan profil desa termasuk terhadap kesulitan mengakses atau menginput data dasar keluarga dan data potensi serta data perkembangan pada siang hari, diantisipasi oleh pemerintah desa untuk mengentri data profil desa pada malam hari, hanya pada malam hari data dengan mudah dapat dientri oleh tim pokja profil desa, sehingga kepala desa setempat berusaha untuk memfasilitasi tim pokja untuk bekerja pada malam hari.

Selain permasalahan pada saat mengentri data profil desa pada siang hari, tentunya juga terdapat permasalahan yang mempengaruhi proses pengentrian yaitu komputer sangat terbatas, komputer yang tersedia di desa sangat terbatas hal akan menghambat jalannya proses pengentrian data profil desa, idealnya adalah khusus untuk proses pengentrian data profil desa dilakukan pada satu komputer saja tidak tercampur dengan komputer yang ada, sehingga pada saat siang hari hampir waktunya habis digunakan untuk melakukan kegiatan rutin, sehingga pengentrian data profil desa tidak tertangani dengan baik.

### Pertanyaan dan Teknik Analisa

**Pertanyaan** yang terdapat di lampiran 1 (satu) Data Dasar Keluarga (DDK), kemudian lampiran 2

(dua) Data Potensi (DPot) serta lampiran 3 (tiga) Data Perkembangan (DPerk), jika diperhatikan secara seksama maka akan dijumpai pertanyaan yang berulang, bisa juga disebut memiliki kesamaan atau kemiripan, permasalahan yang dialami dalam pengisian pada umumnya adalah pada Data Dasar Kependudukan (DDK) muncul kembali pada Data Potensi dan Data Perkembangan, sehingga tingkat kejenuhan muncul pada pengisian data potensi dan perkembangan walaupun hanya tinggal copy paste. berdasarkan pertanyaan tersebut maka dapat dikembangkan dan ditelusuri berbagai pertanyaan yang memiliki makna ganda dari data dasar keluarga, data potensi dan data perkembangan.

Berikut beberapa kesamaan pertanyaan di DDK dipertanyakan kembali di DPot, maupun di DPerk, antara lain mengenai mata pencaharian, pendidikan, akseptor KB, cacat fisik/mental, status kepemilikan rumah, produksi tanaman pangan, produksi tanaman buah-buahan, produksi komoditas, produksi hasil hutan, produksi perikanan, produksi bahan galian, kualitas ibu hamil dan masih banyak yang lain sehingga akan mempertebal dan memperbanyak pertanyaan. Banyaknya pertanyaan yang berulang-ulang akan menjadi jenuh bagi petugas pengentri data, jika pertanyaan tersebut dapat ditelaah dan dikurangi makna dan arti yang sama maka akan dihemat waktu dan biaya dalam proses pengentrian data profil desa.

Selain pertanyaan yang berulang masih ada permasalahan lain dalam pertanyaan adalah antara pertanyaan untuk desa dan untuk kelurahan karena pada hakekatnya pertanyaan yang diajukan untuk desa sangat berbeda dengan karakteristik kelurahan, hal ini akan berpengaruh kepada tebal tipisnya pertanyaan, secara umum antara desa dan kelurahan memiliki perbedaan struktur kewilayahnya sehingga karakteristik dan topografinya sangat berbeda beda, sehingga akan banyak dijumpai kertas-kertas kosong atau kolom-kolom yang kosong dan tidak terisi oleh pejabat yang diserahkan untuk mengisi, wilayah desa pada umumnya memiliki topografi yang berbukit-bukit sedangkan wilayah kelurahan terdapat di dataran datar.

Permasalahan pertanyaan yang berulang ulang dan pengelompokan pemisahan pertanyaan desa dan kota masih ada lagi yaitu pengelompokan tipologi desa merupakan pertanyaan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya kolom-kolom yang kosong dan tidak terisi yang akan mengganggu pada tingkat kejenuhan ketika dalam tahap pengisian, "Pengisian profil desa yang sekarang ini belum memilahkan tipologi desa, jadi banyak kolom-kolom yang harus dilewati yang tidak harus diisi, jika ini dapat di atur dengan aplikasi maka ketika termasuk dalam desa tipologi persawahan maka pertanyaan untuk untuk tipologi desa nelayan begitu

seterusnya” ungkap Hanafi Sekretaris Desa Cipinang.

Dengan adanya aplikasi tersebut nantinya dapat memilah-milah pertanyaan dan segera menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tipologi desa lainnya, pada Pasal 14 terdapat beberapa tipologi desa dan kelurahan yaitu tipologi desa dan kelurahan persawahan, tipologi desa dan kelurahan perladangan, tipologi desa dan kelurahan perkebunan, tipologi desa dan kelurahan peternakan, tipologi desa dan kelurahan nelayan, tipologi desa dan kelurahan pertambangan/galian, tipologi desa dan kelurahan kerajinan dan industri kecil, tipologi desa dan kelurahan industri sedang dan besar, dan tipologi desa dan kelurahan jasa dan perdagangan, setelah membahas beberapa permasalahan tentang pertanyaan, berikut masih terkait dengan hasil akhir dari pertanyaan-pertanyaan adalah cara menganalisis pertanyaan tersebut yang berada di lampiran 3 pada Data Perkembangan.

**Teknik analisis** pengklasifikasian, tentang pengklasifikasian desa swasembada, desa swakarya dan desa swadaya masih perlu dipertimbangkan, karena analisa yang digunakan berdasarkan penuh tidak penuh mengisi data dasar kependudukan dan data potensi kemudian data perkembangan, tanpa melihat situasi dan kondisi kenyataan dilapangan.

“Klasifikasi desa menurut Bambang Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung perlu ditinjau ulang, pasalnya karena pengklasifikasian desa tidak berdasarkan realitas dilapangan namun hanya berdasarkan rumusan analisis profil desa dan kelurahan”

Rumusan analisis yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, yaitu pada proses pengisian data dasar keluarga dan data potensi serta data perkembangan yang dilakukan oleh para pokja desa di desa-desa.

Pengisian profil desa melalui *website* Kemendagri sangat mempengaruhi kedudukan klasifikasi desa, sebagai contoh pada Desa Cipinang klasifikasi menjadi desa swasembada baru pada tahun 2016 dan 2017 hal tersebut bila dilihat dari proses pengisian data potensi dan data perkembangan meliputi data ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik apabila diisi secara penuh melalui *website* masuk dalam klasifikasi swasembada, selanjutnya kita melihat kembali pada tahun 2013 sampai tahun 2015 tidak terisi semua maka masuklah dalam tingkat klasifikasi.

Pada tahun 2013 Desa Cipinang hanya mengisi pada bagian kesehatan dengan nilai 1,00 dan politik dengan nilai 0,74 serta mengisi indeks dengan nilai 0,29 maka diklasifikasikan dalam Desa Swadaya, selanjutnya pada Tahun 2014 Desa Cipinang hanya mengisi pada bagian ekonomi dengan nilai 1,00 dan

pada bagian pendidikan dengan nilai 0,85 dan masuk dalam indek 0,31 maka diklasifikasikan dalam desa swadaya, kemudian pada Tahun 2015 Desa Cipinang hanya mengisi pada bagian politik saja dengan nilai 0,91 dan mendapat indeks 0,15 maka diklasifikasikan dalam desa swadaya.

Hal inilah yang menjadi perhatian bersama bahwa dengan hanya mengisi secara lengkap saja tanpa melihat kondisi real yang sesungguhnya maka klasifikasi desa akan meningkat secara tajam menjadi desa swasembada, dan sebaliknya jika hanya mengisi pada satu bagian saja maka akan diklasifikasikan menjadi desa swadaya.

Peningkatan klasifikasi hendaknya berjenjang mulai dari dasar swadaya mula, madya dan lanjut kemudian meningkat menjadi swakarsa mula, madya dan lanjut kemudian meningkat menjadi swasembada mula, madya dan lanjut. Tahapan-tahapan inilah yang harus dilalui oleh desa tidak semata-mata jika mengisi bidang-bidang yang ditanyakan meloncat meningkat secara tajam.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Pengentrian data profil desa melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh kelompok kerja profil desa (Pokja Profil Desa), keberhasilan pengentrian data profil desa dengan dasar hasil pembahasan disimpulkan bahwa:

**Komitmen Kepala Daerah/Desa**, komitmen kepala desa terutama pada Desa Cipinang proses pengentrian data profil desa sangat bagus karena telah memiliki pokja profil desa sedangkan untuk desa Suka Maju dan Desa Cikalong belum membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja di desanya sehingga capaian pengentrian data profil desa belum ada yang menangani secara khusus.

**Sumber Daya Manusia** Kelompok Kerja Profil Desa pada tingkatan provinsi, kabupaten dan kecamatan sebagai pengelola profil desa hanya sebatas pada pengumpulan laporan dari desa, sedangkan kunci keberhasilannya adalah pada kelompok kerja profil desa yang berada di desa, karena merekalah yang melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengentrian data diolah dan sajikan dalam bentuk profil desa.

**Sarana dan Prasarana**, kelompok kerja profil desa dalam mengentri data dipengaruhi juga oleh sarana dan prasarana yang tersedia dalam proses mengentri data, sebagaimana diketahui dalam pembahasan sebelumnya untuk sarana dan prasarana terdapat keterbatasan sinyal internet yang sulit dijangkau serta peralatan komputer yang sangat terbatas.

**Pertanyaan dan Analisis**, ketidak sesuaian

pertanyaan dan analisis tersebut adalah adanya kesamaan atau kemiripan pertanyaan sehingga berulang ulang, adanya beberapa pertanyaan kemiripan yang terdapat di data dasar keluarga dan data potensi serta data dasar kependudukan terdapat beberapa pertanyaan yang berulang ulang, pertanyaan belum memilah milah pertanyaan untuk desa dan pertanyaan untuk kelurahan dan memisahkan tipologi desa, dan tahapan menganalisis dalam menentukan klasifikasi desa belum sistematis dan berurutan.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka direkomendasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung melakukan pembinaan kepada Pemerintah desa Sukamaju dan Pemerintah Desa Cikalong untuk segera membuat peraturan desa tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Profil Desa, dan keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan melakukan pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa, serta melakukan pengadaan perangkat komputer khusus untuk penanganan profil desa..

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, pada pertanyaan data dasar keluarga, data potensi dan data perkembangan untuk dilakukan penyederhanaan pertanyaan dengan membatasi pada pertanyaan yang berulang-ulang, antara pertanyaan desa dan kelurahan dibedakan serta membedakan pada tipologi desa, dan merevisi tehnik analisa perhitungan dalam menentukan klasifikasi desa serta pemantauan *website* profil desa setiap periodik seminggu sekali dan segera mengupdate data profil desa, dan perlu ada penambahan bandwidth/kapasitas server

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri atas dukungannya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam keikutsertaan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada DR. Heri Saksono atas diskusinya yang bermanfaat.

### DAFTAR PUSTAKA

Achsin, Sitti Nurmasita dkk. 2015. "Profil Desa Dan Kelurahan Sebagai Sumber Informasi: Studi Evaluasi Tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa Dan Kelurahan Di Sulawesi Selatan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerin-

- tahan Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan". Jurnal Komunikasi Kareba Vol.4 No.4 Oktober - Desember 2015.
- Asrori. 2014. Jurnal Bina Praja Jurnal Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Vol. 6 No 4 Desember 2014 ISSN: 2085-4323
- Aswar, Annas. 2017. "Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan". Celebes Media Perkasa. Makasar.
- Budiman, Edy. 2016. "E-Government Data Profil dan Monografi Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda". JTRISTE, Vol.3, No.1, Maret 2016, pp. 49~58 ISSN: 2355-3677
- Dako, Amirudin Y. dkk. 2014. "Prototipe Website untuk Sajian Informasi Profil Desa Binaan Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu Implementasi Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi". SETRUM – Volume 3, No. 2, Desember 2014 ISSN : 2301-4652 9  
<http://catatansang1.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-profil.html>, diunduh tanggal 27 Maret 2018.  
<https://kbbi.web.id/profil>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diunduh tanggal 27 Maret 2018  
<http://fikiporniadi.blogspot.co.id/2014/04/evaluasi-kebijakan.html>, diunduh tanggal 2 April 2018
- Indah, Ika Nur. 2011. "Pembuatan Website Sebagai Sarana Promosi Produk Kelompok Pidra Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan". Journal Speed Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi – Volume 3 No 4 - 2011 - ijns.org, ISSN : 1979-9330.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 140/Kep.327-DPM-Desa/2017 Tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Keputusan Bupati Nomor 410/kep.547-bpmpd/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di daerah Kabupaten Bandung
- Keputusan Kepala Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
- Lail, Jamalul. 2015. "Pembuatan Profil Dukuh Sentono". Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Seri Pengabdian Masyarakat 2015 Volume 4 No. 2, Mei 2015 Halaman 109-111 109
- Laporan Rekapitulasi Data Profil Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa BPMD Provinsi Jawa Barat, 2017
- Laporan Rekapitulasi Profil Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan

- Desa BPMD Kabupaten Bandung Tahun 2017  
Mustopadidjaja.A.R, 2014. “Manajemen Proses Kebijakan Publik”. Duta pertiwi Fundation, Jakarta
- Nobel D. Sekeon. 2016. “Perancangan SIG Dalam Pembuatan Profil Desa Se-Kecamatan Kawangkoan”. E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no.1, Januari – Maret 2016, ISSN :2301-8402 49
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan tentang Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan
- Priyanti, Dwi. 2013. “Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”. IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security - ISSN: 2302-5700 IJNS Volume 2 No 4 - Oktober 2013.
- Provinsi Dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2016
- Profil Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2017.
- Puryanto. 2013. “Pembangunan Website Pada Desa Nangsri”. Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer FTI UNSA 2013 Vol 2 No 1 – Maret 2013
- Utomo, Hartono Dwiwarso. 2010. “Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa”. Berbasis Web, Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999